



LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN
BULAN MEI 2018

Pendahuluan

Komnas HAM merupakan lembaga pelayanan publik yang menjadi tempat permintaan perlindungan yang terakhir bagi warga sipil untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang diduga diambil alih oleh Negara / Koorporasi / Kelompok Bersenjata. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam memenuhi permintaan warga tersebut ada dalam fungsi penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian fungsi pokok Komnas HAM yang paling dikenal dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan

Pada 1 sampai dengan 31 Mei 2018, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah 634 berkas.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Kategori Berkas

Kategori Berkas Kasus										Total
Berkas Kasus Baru 1x					Berkas Lanjutan					
PMT	MDS	Tim	File	Perwakilan	PMT	MDS	TIM	File	Perwakilan	
43	2	1	139	34	219	41	2	112	41	634

2. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah
1	Aceh	2	20	Kalimantan Barat	49
2	Sumatera Utara	50	21	Kalimantan Selatan	3
3	Bengkulu	2	22	Kalimantan Tengah	12
4	Jambi	8	23	Kalimantan Timur	9
5	Riau	14	24	Kalimantan Utara	1
6	Sumatera Barat	29	25	Gorontalo	
7	Sumatera Selatan	21	26	Sulawesi Selatan	19
8	Lampung	8	27	Sulawesi Tenggara	5
9	Kepulauan Bangka Belitung	3	28	Sulawesi Tengah	6
10	Kepulauan Riau	4	29	Sulawesi Utara	3
11	Banten	19	30	Sulawesi Barat	
12	Jawa Barat	47	31	Sulawesi Selatan Barat	
13	DKI Jakarta	166	32	Maluku	11
14	Jawa Tengah	24	33	Maluku Utara	
15	Jawa Timur	67	34	Papua	8
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	9	35	Papua Barat	
17	Bali	8	36	Tanpa Alamat	11
18	Nusa Tenggara Barat	6			
19	Nusa Tenggara Timur	10		Jumlah	634

3. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi pemantauan dan penyelidikan	333
2	Subkomisi mediasi	46
3	TIM	3
4	File	252
	Jumlah	634

4. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	319
2	Tembusan	315
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan ke KH	
Jumlah		634

5. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	71
2	Pos	532
3	Fax	5
4	Email	19
5	Online	6
6	Audiensi	1
7	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif/ Kondisi Khusus	0
8	Jejaring	0
Jumlah		634

6. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	20
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	
3	Hak mengembangkan diri	6
4	Hak memperoleh keadilan	217
5	Hak atas kebebasan pribadi	5
6	Hak atas rasa aman	29
7	Hak atas kesejahteraan	241
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	9
9	Hak perempuan	3
10	Hak anak	2
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	1
12	Non HAM	101
Jumlah		634

6.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	9
Lingkungan hidup	11
	20
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	
	0
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	5
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	1
	6
IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	156
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	10
Kesewenang-wenangan proses hukum di pengadilan	45
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	5
	216
V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	4
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat	
Berkumpul, berapat, dan berserikat	
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	
Menyampaikan pendapat di muka umum	1
Status kewarganegaraan	
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	
	5
VI. Hak atas rasa aman	
Mencari suaka	
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	2
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	8

Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	3
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	13
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	2
	28
VII. Hak atas kesejahteraan	Jumlah berkas
Hak untuk mempunyai milik	6
Hak atas kepemilikan tanah	111
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	38
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	33
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	36
Hak atas kesehatan	8
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	8
	240
VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	Jumlah berkas
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	5
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil	
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	4
	9
IX. Hak perempuan	
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	
Hak atas kesetaraan dengan suami	3
	3
X. Hak anak	Jumlah berkas
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	1
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	1
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	
	2

XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	Jumlah berkas
Pemberlakuan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	1
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	1
XII. Non HAM	Jumlah berkas
Non Ham	101
Jumlah Seluruh	631

7. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Kejaksaan	3
2	Lembaga pendidikan	4
3	Individu - Orang seorang	299
4	Individu - Anak	7
5	Individu - Perempuan	6
6	Individu - Buruh migran	7
7	Individu - Pekerja/Profesi	35
8	Individu - Suku	
9	Individu - Ras dan etnis	
10	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	1
11	Individu - Penyandang cacat	1
12	Individu - LGBT	
13	Individu - Teroris	
14	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	1
15	Individu - Lansia	
16	Individu - Fakir Miskin	
17	Individu - Narapidana	7
18	Kelompok - Masyarakat	140
19	Kelompok - Anak anak	2
20	Kelompok - Perempuan	1
21	Kelompok - Buruh Migran	
22	Kelompok - Pekerja	27

23	Kelompok - Masyarakat Adat	7
24	Kelompok - Ras dan Etnis	1
25	Kelompok - Agama dan penganut kepercayaan	2
26	Kelompok - Penyandang Disabilitas	
27	Kelompok - LGBT	
28	Kelompok - Teroris	
29	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	6
30	Kelompok - Lansia	
31	Kelompok - Fakir miskin	
32	Kelompok - Narapidana	1
33	Organisasi	1
34	Warga Negara Asing (WNA)	2
35	Tanpa Keterangan Pihak Korban	73

8. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	
1	Pemerintah pusat (kementerian)	57
2	Pemerintah daerah	64
3	Lembaga legislatif	
4	Lembaga negara (non kementerian)	7
5	Lembaga peradilan	47
6	POLRI	178
7	TNI	21
8	Kejaksaan	14
9	Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara	6
10	Pemerintah negara lain	2
11	Korporasi	95
12	BUMN/BUMD	28
13	Lembaga pelayanan kesehatan	2
14	Lembaga pendidikan	9
15	Individu - Orang seorang	7
16	Individu - Perempuan	1

17	Individu - Pekerja/Profesi	5
18	Kelompok - Masyarakat	7
19	Kelompok - Pekerja	1
20	Organisasi	3
21	Warga Negara Asing (WNA)	3
22	Tanpa Keterangan Pihak yang Diadukan	77

Jakarta, 4 Juni 2018

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM

KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN

Rima Purnama Salim